

EDUKASI ANTIKORUPSI BAGI ANAK-ANAK, PENTINGKAH?

■ OLEH **SIGIT RAIS**,
ANALIS PUBLIKASI BIRO HUMAS DAN KSI BPK

Seperti parasit yang terus bertengger di permukaan kulit, begitu sulit diberantas. Tak hanya di lingkungan instansi pemerintahan yang selama ini marak diberitakan, perilaku koruptif sebetulnya ada di detail keseharian masyarakat kita.



Setiap hari, tak hentinya kita menyimak berita tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh berbagai kalangan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak-pihak berwenang, untuk memberantas perilaku koruptif yang sangat mengakar di Indonesia. Namun, pada kenyataannya, korupsi masih tetap ada.

Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, atau lebih umum, degradasi atau deformasi dari tatanan politik, telah ada sejak awal pendirian negara (Sampson, 2015). Perilaku koruptif ini disebabkan oleh adanya keserakahan dan ketamakan. Selain itu, korupsi juga lahir dari perbuatan tidak jujur.

Dalam suatu negara, perbuatan koruptif pada administrasi publik dapat mengganggu perekonomian. Hal ini membuat pemerintahan tidak efisien, tidak kompetitif, mencegah perkembangan yang intensif dan inovatif dari suatu negara, menyebabkan penurunan tajam dalam standar hidup, menciptakan nihilisme hukum yang besar, sinisme dan bentuk ekstrim dari umum, apatis, dan bentuk-bentuk citra negatif suatu negara (Botnev, 2014).

Pada tahun 2021, dilansir dari web *transparency.org*, Indonesia menempati urutan ke-96 dari 180 negara, dengan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*) mencapai 38 poin. CPI tersebut menunjukkan urutan peringkat dari 180 negara di seluruh

dunia berdasarkan persepsi tingkat korupsi sektor publik. Hasilnya diberikan dalam skala dari 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan peringkat saja dibandingkan dengan capaian Indonesia pada tahun 2018, yaitu 38 poin dengan peringkat ke-89. Artinya, terdapat negara-negara lain yang mengalami perbaikan, namun kita tidak.

Meskipun berbagai instansi berwenang telah melakukan upaya-upaya untuk memberantas korupsi, hingga saat ini tindak pidana korupsi masih marak. Seperti parasit yang terus bertengger di permukaan kulit, begitu sulit diberantas. Tak hanya di lingkungan instansi pemerintahan yang selama ini marak diberitakan, perilaku koruptif sebetulnya ada di detail keseharian masyarakat kita. Hal tersebut tercermin dari perbuatan menyerobot antrian, membolos sekolah, melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan, dan sederet contoh lain, yang bisa jadi tanpa sadar, mungkin kita kerap melakukannya. Hal tersebut terdengar cukup memprihatinkan, apalagi jika kita paham bahwa perilaku buruk tersebut bisa terwariskan kepada generasi-generasi setelah kita, khususnya anak-anak yang masa depannya ditentukan oleh didikan generasi kita.

Terkait hal tersebut, dalam langkah-langkah upaya pemberantasan korupsi, pendidikan antikorupsi perlu membidik juga bibit-bibit generasi muda Indonesia, di antaranya adalah anak-anak.

Mengapa Anak-Anak?

Anak-anak adalah kuncup bunga yang akan merekah pada masanya nanti. Merekalah yang kelak akan memimpin Indonesia. Oleh karena itu, kita sama-sama berharap anak-anak dapat teredukasi dengan baik mengenai dampak buruk perilaku koruptif bagi keberlangsungan bangsa dan negara.

Anak-anak adalah calon pemimpin masa depan yang potensial. Edukasi antikorupsi terhadap anak-anak diharapkan dapat membantu mematahkan lingkaran perilaku koruptif di Indonesia. Terkait hal tersebut, anak-anak harus memiliki pembelajaran yang tepat tentang lingkungan yang menghargai integritas.

Mubayyinah (2015:235) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan antikorupsi pada anak usia dini, secara umum adalah: (1) Anak memahami dengan baik perilaku antikoruptif; (2) Anak memiliki perilaku sikap antikorupsi; (3) Memberikan bekal kepada anak agar kelak tidak melakukan perbuatan korupsi, karena sesungguhnya perbuatan korupsi itu selain merugikan orang lain, juga mencelakakan pelakunya sendiri; (4) Bagian dari upaya orang tua untuk menghentikan lahirnya koruptor dari lingkungan keluarga; (5) Mencetak generasi bangsa yang memiliki integritas diri yang tinggi; (6) Melakukan pencegahan perilaku korupsi sejak dini.

Terkait hal tersebut, edukasi antikorupsi sejak dini memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan memberikan pemahaman tentang dampak buruk perilaku koruptif kepada anak-anak, anak-anak akan mendapatkan bekal agar kelak tidak melakukan perbuatan korupsi, karena sesungguhnya perbuatan korupsi itu selain merugikan orang lain, juga mencelakakan pelakunya sendiri.

Edukasi antikorupsi tersebut dapat dimulai dari lingkungan keluarga dan sekolah, sebagai lingkungan terdekat dengan keseharian anak-anak. Namun, timbul pertanyaan, edukasi antikorupsi seperti apakah yang tepat untuk diterapkan kepada anak-anak. Sebab, terdapat perbedaan daya serap antara orang dewasa dengan anak-anak.

Anak-anak merupakan cerminan dari selembar kertas putih yang berpeluang ditulisi dengan berbagai warna tinta. Tinta apa yang akan kita goreskan pada lembaran bersih tersebut menentukan bagaimana masa depan bangsa ini. Oleh sebab itu, kita perlu mencermati pola edukasi antikorupsi apa yang tepat diterapkan kepada anak-anak.



Mungkin sangat sulit mengubah perilaku koruptif yang dilakukan para orang dewasa saat ini. Perilaku koruptif bisa jadi sudah menyatu dengan embusan napas sehari-hari. Namun, membentuk karakter generasi muda agar terhindar dari perilaku koruptif bukanlah hal yang tidak mungkin. Hal tersebut bisa diupayakan melalui edukasi antikorupsi sejak dini.

Teori tentang Meniru

Anak-anak merupakan pembelajar yang berkembang melalui proses meniru. Hal ini menyebabkan anak-anak tersebut memerlukan *role model* dalam proses tumbuh kembangnya. Menurut Bandura (1997) sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Kemampuan untuk meniru orang lain merupakan alasan utama perkembangan kecerdasan dan teknologi manusia, sebab meniru merupakan cara yang efisien untuk mempelajari hal baru (Mussen, 1984:141). Dalam hal ini, inti dari pembelajaran sosial adalah pemodelan (*modelling*), dan pemodelan ini merupakan salah satu langkah paling penting dalam pembelajaran.

Pada tahun 1941, dua orang ahli psikologi, yaitu Neil Miller dan John Dollard mengemukakan bahwa peniruan (*imitation*) merupakan hasil proses pembelajaran yang ditiru dari orang lain. Perilaku peniruan tersebut terjadi karena manusia merasa telah memperoleh tambahan ketika kita meniru orang lain, dan memperoleh hukuman ketika kita tidak menirunya.

Tujuan meniru dari setiap anak berbeda-

beda. Hal tersebut bergantung pada fase usia mereka. Mussen mengelompokkan fungsi-fungsi yang berbeda dalam meniru, yaitu: (1) Pengaruh ketidakpastian; (2) Meniru untuk memajukan interaksi sosial; (3) Meniru untuk mempertinggi kemiripan terhadap orang lain; (4) Timbulnya emosi sebagai dasar dari meniru; (5) Meniru untuk mencapai tujuan.

Berkenaan dengan hal tersebut, anak-anak memerlukan percontohan atau figur teladan untuk menyerap nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan mereka. Anak-anak memerlukan contoh konkret, yang setiap hal baiknya dapat mereka serap. Hal ini bisa diperoleh melalui media-media edukasi yang di dalamnya menyisipkan nilai-nilai yang dapat diteladani oleh anak-anak.

Implementasi 9 Nilai Antikorupsi pada Berbagai Media Edukasi

Edukasi antikorupsi perlu diberikan kepada anak-anak sejak dini. Selain dapat membentuk karakter anak, dengan adanya edukasi tersebut, diharapkan anak-anak dapat menghargai hak-hak orang lain, serta menahan diri untuk tidak melakukan perilaku yang melanggar aturan. Selanjutnya, mengajarkan tentang antikorupsi sejak dini juga turut menanamkan nilai kejujuran pada anak yang akan dibawanya hingga dewasa.

Sebagai bentuk antisipasi sekaligus melindungi mental bangsa dari perilaku koruptif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginisiasi 9 nilai antikorupsi. Kesembilan nilai antikorupsi tersebut, yaitu 1) kejujuran; 2) kepedulian; 3) kemandirian; 4) kedisiplinan; 5) tanggung jawab; 6) kerja keras; 7) kesederhanaan; 8) keberanian; dan 9) keadilan. Kesembilan nilai antikorupsi tersebut merupakan nilai-nilai dasar yang perlu disampaikan kepada masyarakat dalam rangka upaya pencegahan korupsi.

Dalam konteks edukasi bagi anak-anak, kesembilan nilai antikorupsi tersebut perlu diformulasikan secara khusus melalui suatu media penyampaian pesan sehingga mudah dicerna dan dipahami oleh anak-anak. Dalam hal ini, pesan-pesan antikorupsi perlu disampaikan secara halus, tidak memerintah, namun mengarahkan.

Barbara O'Keefe (Littlejohn, 2017: 30) mengemukakan bahwa terdapat beragam cara untuk memahami suatu pesan dan alasan komunikator dalam memutuskan pesan-pesan yang akan disampaikan kepada khalayak. Terkait hal tersebut, O'Keefe menggunakan istilah *message design logic* untuk mendeskripsikan proses penciptaan di balik suatu pesan. Rancangan suatu pesan di-

dasari oleh kecenderungan seseorang dalam mengatur tujuannya dalam upayanya menyampaikan pesan. Dalam hal ini, setiap pembuat pesan tentunya telah memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam proses penciptaan pesan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, KPK sebagai produsen pesan, telah menentukan strategi serta merumuskan formulasi yang tepat untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi melalui media yang dapat diterima oleh anak-anak secara tepat.

Sebagai contoh, KPK telah menerbitkan buku cerita bergambar dengan maskot "Si Kumbi", serta memproduksi film animasi berseri bertajuk "Sahabat Pemberani". Melalui kedua media tersebut, KPK mengemas dan memformulasikan nilai-nilai antikorupsi sedemikian rupa, sehingga akan mudah diserap oleh anak-anak.

Buku cerita bergambar dan film tersebut merupakan dua di antara sekian banyak media yang efektif untuk menyampaikan gagasan tentang nilai-nilai antikorupsi. Dalam tataran komunikasi, buku cerita bergambar dan film ini pun tidak hanya dipandang sebagai hiburan yang menyajikan tontonan dan cerita. Keduanya merupakan media komunikasi yang efektif dalam menyampaikan gagasan tentang nilai-nilai antikorupsi. Bahkan, film animasi dikatakan memiliki dampak yang lebih dibandingkan dengan pemanfaatan buku. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Marsh (dalam Rahmatullah, 2011:5), bahwa film animasi dapat memberikan pengalaman belajar kepada anak secara lebih bermakna dan menghasilkan stimulus yang lebih besar dibandingkan sekadar membaca buku teks. Dalam hal ini, film animasi telah memadukan unsur audio, video, dan teks menjadi satu kesatuan penyajian. Akibatnya, film animasi memiliki banyak kelebihan, khususnya tentang dalam hal daya tarik.

Anak-anak seringkali mengidolakan tokoh-tokoh tertentu dalam cerita fiksi atau film animasi favorit mereka. Bahkan, terkadang anak-anak meneladani setiap gerak, laku, atau sikap karakter-karakter dari karakter yang diserapnya. Di situlah letak peluang bagi para produsen pesan untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi secara lembut, tanpa terkesan memerintah atau memaksakan. Produsen pesan perlu menggunakan formulasi khusus agar kesembilan nilai antikorupsi dapat tersampaikan dengan baik kepada anak-anak. Formulasi khusus tersebut meliputi pemanfaatan *role model* yang dapat diteladani oleh anak-anak, bobot cerita, dan cara penyampaian pesan-pesan antikorupsi.

Terkait pemanfaatan *role model*, merujuk pada teori imitasi yang dikemukakan sebelumnya, anak-anak merupakan pembelajar yang berkembang melalui proses meniru. Hal ini menyebabkan bahwa anak-anak tersebut memerlukan *role model* dalam proses tumbuh kembangnya. Terkait hal tersebut, produsen pesan perlu menciptakan tokoh-tokoh yang dapat menjadi idola baru bagi anak-anak.

Kemampuan penerimaan informasi anak-anak berbeda dengan kemampuan orang dewasa. Kita tidak bisa serta merta mengatakan “jangan korupsi” kepada anak-anak. Di sinilah letak pentingnya kemampuan untuk memformulasikan nilai-nilai antikorupsi bagi anak-anak. Apa lagi saat ini akses anak-anak menuju media sosial, dengan segala dampak baik dan buruknya, terasa sangat mudah. Setiap hari, anak-anak kita diintai oleh berbagai tayangan yang dapat diakses dengan mudah melalui gawai pintar. Terkadang, kita yang dililit kesibukan pekerjaan sehari-hari, menyerahkan begitu saja pandang mata anak kita pada layar gawai pintar itu.

Mungkin anak-anak zaman sekarang sulit dipisahkan dari gawai pintar, yang tugasnya adalah memanjakan mata mereka. Namun, se-pintar apapun teknologi, kita sebagai orang tua tetap pemegang kendali. Kita bisa mulai dengan membatasi atau menyeleksi tayangan yang dapat mereka konsumsi. Tak mudah memang, tapi masih bisa diupayakan. Kita bisa membatasi durasi penggunaan gawai pintar, lantas mensubstitusinya dengan kegiatan membaca buku cerita bersama, atau nonton film animasi edukatif bersama. Dalam hal ini, kita memang perlu meluangkan waktu ekstra, di tengah himpitan beban kerja. Sekali lagi, itu bukan hal yang mudah, namun masih dapat kita upayakan demi masa depan anak-anak kita.



Perilaku koruptif yang membunyah di tengah masyarakat merupakan hal yang menggelisahkan. Untuk memperbaikinya bukanlah hal yang mudah. Meski upaya optimal telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, juga BPK melalui pemeriksaannya, pada kenyataannya dari tahun ke tahun korupsi masih saja menorehkan namanya dalam lembaran sejarah bangsa. Tapi, kita perlu optimistis dengan hari depan. Sebab, saat ini ada anak-anak, generasi penerus kita, yang masih dapat kita arahkan. Kita yang bertanggungjawab, hal-hal baik apa yang akan kita tanamkan dalam diri anak-anak itu. Edukasi macam apa yang akan kita wariskan sebagai bekal mereka melangkah?

Sesekali, tataplah dalam-dalam mata anak-anak kita. Tegakah kita membiarkan cahaya dalam bening mata itu redup saat dewasa? Sanggupkah kita menyaksikan anak-anak itu tumbuh menjadi figur-figur koruptif sebab tak pernah mendapat bekal yang cukup dari kita? Itu adalah pekerjaan rumah dan tanggung jawab kita bersama.

Yakin saja dulu, masa depan bangsa ini akan lebih baik. Anak-anak kita akan tumbuh jadi generasi terbaik, yang melanjutkan perjuangan kita dalam berbagai ruang dan bidang. Semoga. ●

Referensi:

- Bandura, Albert. (1997). *Self-Efficacy - The Exercise of Control*. New York: W.H. Freeman and Company.
- Botnev, V., Gorlanov, G., Illarionova, T., Kirichenko, A., Koroteeva, O., & Nasriddinov, T. (2014). *Anti-Corruption Policy in Education*. Published Papers at Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2017). *Theories of Human Communication Eleventh Edition*. Illinois: Waveland Press.
- Mubayyinah, Fira. (2014). *SEMAI: Sembilan Nilai Antikorupsi dalam Pendidikan Anak Usia Dini*. Al Hikmah: Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education, Vo. 1 (2), 2017, PP.223-238.
- Mussen, Paul Henry, dkk. (1984). *Perkembangan dan Kepribadian Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Rahmatullah, Muhammad. (2011). *Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran Film Animasi terhadap Hasil Belajar IPS*. Disertasi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sampson, S. (2015). *The Anti-corruption Package*. *Ephemera Theory & Politics in Organization*, 15(2), 435-443.

transparency.org

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email **wartapemeriksa@bpk.go.id** dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa *fee* menulis sebesar Rp750.000.